

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Hak atas kesehatan disebut-sebut sebagai salah satu hak dasar (hak fundamental) milik setiap orang yang ditetapkan pada sejumlah konvensi dan instrumen hukum internasional. Pembukaan *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia yang mendasar, memuat ketentuan sebagai berikut: Penikmatan standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai merupakan salah satu hak dasar setiap manusia tanpa membedakan ras, agama, keyakinan politik, kondisi ekonomi atau sosial (Mardiansyah, 2018). Dengan demikian hak atas kesehatan sebagai salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu harus dihormati dan dipenuhi oleh negara tanpa membedakan suku, agama, latar belakang politik, ekonomi maupun kondisi sosial.

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) akan menjadi komponen kunci Visi Indonesia 2020–2024 dengan kemajuan di bidang kesehatan sebagai titik awalnya. Kesehatan ibu dan anak merupakan prioritas utama dalam industri kesehatan. Pada tanggal 14 Juli 2019 dalam pidatonya Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa titik awal untuk memulai pembangunan SDM melalui langkah-langkah dalam menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, balita, dan anak usia sekolah, termasuk upaya mengatasi *stunting* (Widyastuti et al., 2022). *Stunting* adalah pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi seseorang dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan anak mengalami masalah kurang gizi kronis. *Stunting* dimulai saat anak masih dalam kandungan dan baru

terlihat pada usia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak yang berakibat penderitanya akan lebih rentan terhadap penyakit dan kecil kemungkinannya untuk memiliki postur tubuh yang sehat saat dewasa (Nurak et al., 2022).

*Stunting* dapat dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi, antara lain kondisi sosial ekonomi keluarga yang meliputi pendidikan ibu, status pekerjaan, pendapatan keluarga, pemahaman ibu terhadap gizi, dan jumlah anggota keluarga. Selain itu, *stunting* juga dipengaruhi oleh faktor kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, perilaku penduduk, dan kesehatan reproduksi. *Stunting* di Indonesia masih tinggi yang membuat Indonesia berada pada peringkat lima besar dunia mengenai permasalahan *stunting*, sehingga Pemerintah Pusat melakukan *intervensi* terpadu untuk menurunkan *stunting* dengan memberikan prioritas kepada kabupaten atau kota dalam penanganan *stunting* di berbagai daerah, salah satunya Provinsi Jawa Tengah yang menjadi prioritas penanganan *stunting*. *Stunting* di Indonesia masih tinggi sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat lima besar dunia permasalahan *stunting* (Bappeda, 2019). Dalam laporan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa pada tahun 2020, prevalensi *stunting* di Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar 14,9%, dimana terdapat 14,9% balita pendek dan sangat pendek dari 955.835 balita yang diukur (Ika Purnamasari, Fitri Widiyati, 2022)

Kabupaten/kota dengan angka prevalensi balita pendek dan balita sangat pendek disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pola asupan pangan yang beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman, yang ditunjukkan oleh angka rata-rata konsumsi energi yang lebih rendah. Upaya penanggulangan masalah *stunting* pada balita telah dimasukkan ke

dalam kegiatan perbaikan gizi selama masa kehamilan, serta pemberian ASI eksklusif dan kegiatan pemberian makanan pendamping ASI bagi balita.

Salah satu daerah yang menjadi prioritas penanganan *stunting* di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Pemalang. Menurut Arifiyandi, (2023) Bupati Pemalang Mansur Hidayat menyatakan bahwa kasus *stunting* dari tahun 2021-2023 telah mengalami penurunan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

Tabel I.I Angka Stunting per Tahun 2021-2023

2021	2022	2023
10,35%	9,61%	8,03%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

Dari tabel diatas ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pemalang mempunyai angka kasus *stunting* balita yang sudah mulai menurun namun masih memerlukan penanganan yang lebih tepat. Dalam upayanya diperlukan konvergensi dari berbagai pihak di berbagai tingkatan, tidak hanya dari sisi kesehatan untuk menghindari dan mengatasinya. Agar tindakan dapat dilakukan secara jelas, terukur, terfokus, dan harmonis dalam mencegah dan mengatasi kasus *stunting*, maka para pemangku kepentingan harus memiliki kesadaran dan pemahaman bersama tentang *stunting*.

Secara kelembagaan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Sementara itu, percepatan *intervensi* diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia (RAN PASTI) Tahun 2021-2024 (Yudiana, 2022). Menurut Wakil Bupati Pemalang Mansur Pemalangkab.go.id,

(2021) menjelaskan bahwa penanggulangan *stunting* telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan *stunting* tahun 2018-2024 yang tertuang dalam Perbup RAD *Stunting* Nomor 84/2019 tanggal 1 November 2019 tentang RAD Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* Tahun 2020-2024.

Pelaksanaan, pencegahan dan penanggulangan *stunting* pada tahun 2020 di kabupaten Pemalang berdasarkan penilaian kinerja oleh Tim Penilai tingkat Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai kabupaten pelaksana terbaik ketiga se-Provinsi Jawa Tengah. Walaupun telah ditetapkan sebagai kabupaten terbaik dalam pencegahan dan penanggulangan masalah *stunting*, Pemalang masih perlu mendapatkan perhatian karena kasus *stunting* di masyarakat bukan hanya disebabkan karena faktor pangan dan gizi saja tetapi lebih banyak disebabkan oleh faktor lingkungan yang kurang sehat dan perilaku masyarakat terutama pada asuh dan pola makan.

Sebagai bentuk pengembangan inovasi dalam penanggulangan *Stunting*, kabupaten Pemalang pada tahun 2020 telah melaksanakan lomba inovasi pencegahan dan penanggulangan *Stunting* tingkat kabupaten. Sedangkan pengembangan inovasi di Kabupaten Pemalang yang sudah dilaksanakan antara lain, kartu Pintar Layanan Anak Bunda yang digunakan untuk menilai status gizi dengan standar antropometri terbaru yaitu PMK No. 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri, kemudian Digitalisasi Posyandu ke dalam Sidekem (Sistem Informasi Desa dan Kawasan Pemalang), Optimalisasi Sistem Rujukan dari tingkat Posyandu dirujuk ke Puskesmas dan dilanjutkan ke Rumah Sakit (Pemalangkab.go.id, 2021).

Regulasi pemerintah Kabupaten Pemalang dalam penanganan kasus *stunting* menjadi unsur yang paling utama. Dalam penanganan kasus *stunting* di Kabupaten

Pemalang, Dinas Kesehatan yang menjadi aktor utama dan mempunyai peran penting dalam menekan prevalensi *stunting*. Regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang dalam upaya penanganan kasus *stunting*, yaitu Surat Keputusan Bupati Nomor 188.4/9611//Tahun 2019 mengenai Pembentukan Tim Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2019 juga telah mengatur mengenai Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *stunting* di Kabupaten Pemalang.

Tidak hanya pemerintah saja yang berupaya untuk mencegah *stunting* di Kabupaten Pemalang, dibutuhkan juga partisipasi dari masyarakat dikarenakan dengan adanya keterlibatan dari masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program sosial yang dicanangkan oleh pemerintah, serta membantu masyarakat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Dengan berlandaskan akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam sebuah proses penanganan *stunting*, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat sebuah program inovasi unggulan pada tahun 2019 yang bernama 5Ng (JateNG GayeNG NginceNG woNG meteNG) yang merupakan sebuah kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk membantu mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang mana program ini dilaksanakan dalam 4 fase, yaitu: Fase sebelum Hamil, Fase Kehamilan, Fase Persalinan, dan Fase Nifas. Sebuah program inovasi ini muncul dengan dilatarbelakangi oleh perlu diciptakannya suatu kondisi dimana ibu hamil terpantau supaya mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal sehingga ibu selamat, dan bayi sehat.

Program inovasi unggulan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini yang kemudian direalisasikan di setiap kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan nama

inovasi yang berbeda-beda di setiap kabupatennya. Mengacu pada program 5Ng (JateNG GayeNG NginceNG woNG meteNG), Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang memunculkan sebuah program inovasi dalam penanganan dan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Pemalang dengan nama Mawar Nyiteng (Ma'e Waras Bayine Kenteng). Mawar Nyiteng (Ma'e Waras Bayine Kenteng) merupakan sebuah gerakan kawal minum tablet tambah darah ibu hamil oleh keluarga yang merupakan salah satu program pemerintah kabupaten pemalang yang bertujuan untuk menyelamatkan ibu melahirkan dan bayinya agar tidak menjadi balita *stunting*. Gerakan ini telah di implementasikan oleh 25 puskesmas di Kabupten Pemalang.

Dari keterangan diatas penelitian ini akan membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Studi kasus ini mengambil di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah karena pada tahun 2022 upaya dan kerja keras dari seluruh pihak yang terintegrasi dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan *stunting* di kabupaten Pemalang di tahun 2021 sampai tahun 2022 membuahkan hasil. Kabupaten pemalang akhirnya memperoleh penghargaan sebagai kabupaten pelaksana terbaik pertama penilaian aksi konvergensi se-Provinsi Jawa Tengah dengan menetapkan 10 desa sebagai lokus penanganan *stunting* setiap tahunnya dan secara akumulatif kabupaten Pemalang telah menetapkan 50 desa lokus pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dalam Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* sampai tahun2024 (H. K. Pemalang, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana partisipasi masyarakat melalui program Mawar Nyiteng dalam mengatasi permasalahan *stunting* di kabupaten pemalang seperti yang terdapat dalam 7 indikator

determinan *stunting* yang menjadi acuan seluruh kabupaten di Indonesia dilihat melalui sistem (e-PPGBM).

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam bentuk gerakan masyarakat di Kabupaten Pemalang dalam penanggulangan *stunting* ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam bentuk gerakan masyarakat di Kabupaten Pemalang dalam penanggulangan *stunting*.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya kajian keilmuan yang berkaitan dengan inovasi kebijakan penanganan *stunting* di Kabupaten Pemalang.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Khususnya sebagai pertimbangan untuk melihat seberapa efektif inovasi kebijakan penanganan *stunting* yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang.

### 1.5. Kajian Pustaka

Studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan inovasi kebijakan penanganan *stunting* di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut :

No	Nama Peneliti	Judul dan link	Ringkasan Hasil
1.	Salasati Dinas Mudi, Turtiantoro, Dewi Erowati.	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam Penurunan dan Penanggulangan <i>Stunting</i> di Desa Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang. <u><a href="#">IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG DALAM PENURUNAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI DESA LONGKEYANG, KECAMATAN BODEH, KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021   Mudi   Journal of Politic and Government Studies (undip.ac.id)</a></u>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan <i>stunting</i> di Desa Longkeyang masih belum maksimal. Misalnya, masih adanya ruang perbaikan pada kemampuan para pelaksana kebijakan dalam berkomunikasi secara jelas, masih adanya kesenjangan komunikasi, dan jumlah sumber daya manusia yang tersedia di Puskesmas Jatiroyom masih kurang. Kurangnya fasilitas pendukung <i>stunting</i> , kurangnya sumber daya peralatan di masyarakat, dan kurangnya dana menjadi faktor penyebab tidak adanya promosi kesehatan. Kerangka administratif, prosedur transmisi, konsistensi, dan pembuangan telah berjalan dengan baik untuk sementara. Penerapan kebijakan ini antara lain terhambat oleh pertimbangan internal, eksternal, dan geografis.
2.	Rini Archda Saputri.	Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan <i>Stunting</i> di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. <u><a href="#">UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG   JDP (JURNAL</a></u>	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa selain program yang berasal dari pemerintah pusat, Kabupaten Bangka dan Bangka Barat mempunyai program inovatif tersendiri untuk mempercepat penurunan atau penghapusan <i>stunting</i> di wilayahnya masing-masing. Namun, masih diperlukan waktu dan upaya untuk sepenuhnya melaksanakan program-program ini dan menilai relevansi hasilnya, dengan mempertimbangkan pertimbangan internal, eksternal, dan regional.

		<u>DINAMIKA PEMERINTAHAN) (univrab.ac.id)</u>	
3.	Rico Mardiansyah	Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia. <u>DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DI INDONESIA   Veritas et Justitia (unpar.ac.id)</u>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun jaminan kesehatan merupakan hak setiap orang (warga negara), namun negara memperlakukan warganya secara berbeda dalam melaksanakannya, khususnya bagi masyarakat yang tergolong miskin dan tidak mampu serta masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori miskin. Seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan kesehatan kepada semua warga negara secara setara.
4.	Yeni Widyastuti, Uus Fanny Nur Rahayu, Tia Mulyana, Amal Maftuh Khoiri	Sosialisasi <i>Stunting</i> dan Upaya Pencegahannya di Desa Padarincang, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. <u>Sosialisasi Stunting dan Upaya Pencegahannya di Desa... - Google Scholar</u>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>stunting</i> merupakan permasalahan yang tidak hanya terkait dengan variabel genetik, seperti faktor keturunan keluarga. Namun, setelah penelitian ini dilakukan, sudut pandang tersebut berubah dan banyak orang menyadari betapa pentingnya menyediakan pola makan seimbang, terutama bagi ibu hamil, bayi baru lahir, dan balita. <i>Stunting</i> juga dapat dihindari dengan memperhatikan elemen lain termasuk kebersihan lingkungan dan aksesibilitas air bersih.
5.	Anitha Nurak, Lina Andayani, Sahriani	Efektivitas Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Dalam Upaya Penanggulangan <i>Stunting</i> . <u>Efektivitas Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Dalam Upaya Penanggulangan Stunting   Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)</u>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kerja Pemerintah Kabupaten Mamberamo dan pemerintah pusat telah dilaksanakan, namun masih terdapat banyak tantangan dalam melaksanakan inisiatif untuk mempercepat penurunan dan pemberantasan <i>stunting</i> di daerah tersebut. Proyek kerja yang dijalankan saat ini antara lain pembentukan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (TPPS), program intervensi Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman,

		( <a href="http://universitaspahlawan.ac.id">universitaspahlawan.ac.id</a> )	kebijakan kreatif, dan kebijakan inovasi Emo-Demo.
6.	Ika Purnamasari, Fitri Widiyanti, Muhammad Sahli	Analisis Faktor Resiko Yang Mempengaruhi Kejadian <i>Stunting</i> Pada Balita. <u>Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Balita   Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ</u>	Hasil penelitian tersebut mendukung hipotesis bahwa berat badan lahir, gelar pendidikan formal ibu, dan jarak ke fasilitas pelayanan kesehatan merupakan faktor penentu utama balita <i>stunting</i> .
7.	Tjetjep Yudiana	Strategi Penguatan SDM Dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Provinsi Kepulauan Riau. <u>STRATEGI PENGUATAN SDM DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU   Jurnal Good Governance (stialan.ac.id)</u>	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa prevalensi <i>stunting</i> di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 17,6% dibandingkan rata-rata nasional sebesar 16,8%. Untuk mempercepat penurunan <i>stunting</i> di Provinsi Kepulauan Riau dan mencapai target 14% pada tahun 2024, berikut ini disusun strategi penguatan sumber daya manusia berdasarkan temuan penelitian dengan pendekatan kualitatif, kajian berbagai data sekunder, data primer, serta data yang diperoleh melalui FGD dan wawancara mendalam, antara lain : 1. Membangun platform media sosial informasi dan edukasi berbasis digital dengan menggunakan aplikasi SILANGSING. 2. Tim Penggerak PKK provinsi dan kabupaten/kota melakukan penghitungan kapasitas kader di PMT Gizi. 3. Pemerintah Provinsi Kepri dan masyarakat setempat mendukung UMKM
8.	Abdika Jaya	Kebijakan Penanggulangan <i>Stunting</i> di Kabupaten Rawas. <u>KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN MUSI</u>	<i>Stunting</i> dipengaruhi oleh variabel sosial ekonomi termasuk kemiskinan, pendidikan, pendapatan keluarga, dan kesehatan. Pencegahan <i>stunting</i> dilakukan secara menyeluruh dan memerlukan kerja sama lintas sektor. Diperlukan tindak lanjut di tingkat daerah

		<p><a href="#">RAWAS   Jurnal Masda (unmura.ac.id)</a></p>	<p>hingga desa, yang tidak hanya melibatkan sektor kesehatan tetapi juga sektor terkait lainnya, terhadap kebijakan dan peraturan yang ada di tingkat federal. Sistem pencegahan berbasis masyarakat harus diperkuat lebih lanjut karena pemahaman masyarakat yang kuat tentang pentingnya pola makan yang sehat, kebersihan yang baik, dan lingkungan yang bersih sangat penting untuk menurunkan prevalensi <i>stunting</i>.</p>
9.	Novi Hidayati	<p>Berat Badan dan Panjang Badan Lahir Meningkatkan Kejadian <i>Stunting</i>.  <a href="#">Berat Badan dan Panjang Badan Lahir Meningkatkan... - Google Scholar</a></p>	<p>Berdasarkan temuan penelitian, terdapat 20,4% prevalensi panjang badan lahir rendah pada balita di Desa Jebed Utara pada tahun 2020, prevalensi berat badan lahir rendah pada balita di Desa Jebed Utara sebesar 23,8%, dan prevalensi <i>stunting</i> pada balita sebesar 11,7%. Berdasarkan temuan analisis statistik tambahan, terdapat hubungan antara panjang badan lahir dengan kejadian <i>stunting</i> pada balita di Desa Jebed Utara pada tahun 2020 namun tidak ada hubungan antara berat badan lahir dengan kejadian tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyarankan agar Dinas Kesehatan meningkatkan upaya pelacakan tumbuh kembang balita, khususnya yang memiliki panjang badan lahir pendek, dengan melakukan pengukuran panjang badan anak secara rutin yang dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan penimbangan balita di Posyandu.</p>
10.	Novianti Tysmala Dewi, Dhenok Widari	<p>Hubungan Berat Badan Lahir Rendah dan Penyakit Infeksi dengan Kejadian <i>Stunting</i> pada Baduta di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.  <a href="#">Hubungan Berat Badan Lahir Rendah dan Penyakit Infeksi... - Google Scholar</a></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berat badan lahir rendah merupakan salah satu faktor penyebab <i>stunting</i> pada balita, serta penyakit diare dan ISPA yang terjadi dalam tiga bulan sebelumnya. Penyakit infeksi merupakan faktor terbesar penyebab <i>stunting</i> yaitu baduta dengan penyakit infeksi 3,071 kali lebih besar berisiko mengalami <i>stunting</i></p>

			dibandingkan dengan baduta yang tidak mengalami penyakit infeksi.
11.	Gladys Apriluana dan Sandra Fikawati.	<p>Analisis Faktor-Faktor Risiko terhadap Kejadian <i>Stunting</i> pada Balita (0-59 Bulan) di Negara Berkembang dan Asia Tenggara.</p> <p><u>Analisis Faktor-Faktor Risiko terhadap Kejadian Stunting pada Balita (0-59 Bulan) di Negara Berkembang dan Asia Tenggara   Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan</u> (kemkes.go.id)</p>	<p>Temuan penelitian menunjukkan bahwa komponen status gizi dengan berat badan lahir 2.500 gram berpengaruh signifikan terhadap prevalensi <i>stunting</i> pada anak dan membawa risiko <i>stunting</i> sebesar 3,82 kali lipat. Rendahnya pendidikan ibu berdampak besar terhadap prevalensi <i>stunting</i> pada anak dan membawa peningkatan risiko <i>stunting</i> sebesar 1,67 kali lipat. <i>Stunting</i> pada balita terbukti signifikan diprediksi oleh faktor pendapatan rumah tangga miskin sebesar 2,1 kali lipat. <i>Stunting</i> pada balita sangat dipengaruhi oleh variabel terkait sanitasi yang buruk, dan risiko ini mungkin meningkat hingga 5,0 kali lipat. Penelitian ini menemukan bahwa risiko <i>stunting</i> pada balita meningkat seiring dengan rendahnya berat badan lahir (BBLR), tingkat pendidikan ibu, pendapatan rumah tangga, dan kebersihan sanitasi rumah yang buruk.</p>

Penelitian ini memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya terdapat pada fokus pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam bentuk gerakan masyarakat. Selain itu, perbedaan lain terdapat pada fokus penelitian penanggulangan stunting terhadap faktor determinan stunting yang berlandaskan pada E-PPGBM atau elektronik pencatatan dan pelaporan gizi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki aspek pembaharuan pada fokus pembahasan yakni partisipasi masyarakat dalam bentuk gerakan masyarakat di Kabupaten Pematang dalam penanggulangan stunting dan faktor determinan stunting yang berlandaskan pada E-PPGBM atau elektronik pencatatan dan pelaporan gizi masyarakat.

## 1.6. Kerangka Dasar Teori

Penelitian ini akan berfokus pada inovasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menangani kasus *stunting* yang terjadi di Kabupaten Pematang Jaya.

### 1. Pemerintah Daerah

Pemerintahan menurut Sugiman, (2018) merupakan sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu dalam melaksanakan kekuasaan yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sedangkan, Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Salam & Prathama, 2022). Menurut Akhmaddhian, (2017) mengatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai suatu kewenangan yang sangat besar dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah kebijakan serta program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Menurut Fauzi, (2019) menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah memiliki posisi yang penting dan mencolok pada suatu struktur pemerintah daerah. Sedangkan menurut Djadjuli, (2018) penyelenggara pemerintah daerah yaitu gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah lembaga ataupun instansi yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan upaya

penanganan *stunting* di Kabupaten Pemalang. Lembaga atau instansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan yang berperan sebagai pemeran utama dalam penanganan kasus *stunting* di Kabupaten Pemalang.

## 2. *Stunting*

Balita pendek (*Stunting*) adalah status gizi yang didasarkan pada indeks PB/U atau TB/U dimana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (Z-Score)  $<-2$  SD sampai dengan  $-3$  SD (pendek/*stunted*) dan  $<-3$  SD (sangat pendek/*severely stunted*) (Rahmadhita, 2020). *Stunting* adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. *Stunting* dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. *Stunting* yang telah terjadi bila tidak diimbangi dengan *catch-up growth* (tumbuh kejar) mengakibatkan menurunnya pertumbuhan, masalah *stunting* merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya risiko kesakitan, kematian dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental. *Stunting* dibentuk oleh *growth faltering* dan *catch up growth* yang tidak memadai yang mencerminkan ketidakmampuan untuk mencapai pertumbuhan optimal, hal tersebut mengungkapkan bahwa kelompok balita yang lahir dengan berat badan normal dapat mengalami *stunting* bila pemenuhan kebutuhan selanjutnya tidak terpenuhi dengan baik (Djauhari, 2017).

Adapun faktor-faktor penyebab *stunting* terbagi atas faktor langsung dan tidak langsung. Menurut WHO dalam penelitian Darwin Parlaungan et al, (2023) Faktor langsung antara lain ibu yang mengalami kekurangan nutrisi, kehamilan preterm, pemberian makanan yang tidak optimal, tidak ASI eksklusif dan infeksi. Sedangkan faktor tidak langsungnya yaitu pelayanan kesehatan, Pendidikan, sosial budaya, dan sanitasi lingkungan. Berdasarkan faktor tersebut diketahui bahwa *stunting* tidak terjadi hanya disebabkan oleh anak tersebut, namun juga ibunya karena asupan gizi yang dibutuhkan untuk mencegah *stunting* berupa asupan gizi yang baik saat hamil. Sehingga pengetahuan ibu sangat penting dalam pencegahan *stunting* dan berdasarkan faktor tersebut dapat kita ketahui bahwa *stunting* bisa terjadi dikarenakan faktor langsung dan tidak langsung. Adapun pola hidup sehat termasuk kedalam pencegahan kedua faktor tersebut yang mana pola hidup sehat inilah yang dapat mencegah kedua faktor penyebab *stunting* baik langsung dan tidak langsung.

Kemudian sesuai dengan Permenkes RI Nomer 14 Tahun 2019 mengenai Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi pasal 3 yang berbunyi: “Pelaksanaan Surveilans Gizi diselenggarakan melalui indikator masalah gizi dan kinerja program gizi. Penyelenggaraan teknis Surveilans Gizi juga memerlukan indikator lain seperti Faktor Risiko yang turut memberikan pengaruh pada masalah gizi dan kinerja program gizi”. Pengaturan pelaksanaan teknis surveilans gizi ditujukan guna: (1) Memberikan pedoman terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga pelaksana program gizi guna mendukung pencapaian program perbaikan gizi, (2) Menata penyelenggaraan surveilans gizi di seluruh tingkatan pemerintahan, dan (3)

Mendesripsikan secara menyeluruh tentang permasalahan gizi dan pencapaian indikator kinerja gizi (Republik Indonesia, 2019).

Strategi Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dalam upaya penurunan angka *stunting* adalah dengan penekanan pada keakuratan data pada elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGM) oleh survailans gizi, sehingga informasi yang diperoleh sesuai dan intervensi yang dilakukan tepat sasaran. Keakuran data dan informasi yang reliabel dipengaruhi oleh sebuah sistem informasi kesehatan yang baik. Secara faktual, apabila sistem tersebut ditelisik lebih jauh di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat, sistem informasi e-PPGBM ini masih belum berkontribusi menghasilkan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu (Sugianti, 2020).

Dari data yang didapatkan melalui e-PPGBM di Kabupaten Pematang Jaya mengenai *stunting*, maka diperoleh beberapa indikator seperti kepemilikan JKN/BPJS, ketersediaan air bersih, jamban sehat, merokok, status imunisasi, ibu hamil KEK, dan penyakit penyerta yang menjadi faktor determinan permasalahan *stunting* di Kabupaten Pematang Jaya.

### 3. Partisipasi Masyarakat

Menurut Everett M Rogers (Pangemanan, 2022) menyebutkan bahwa inovasi merupakan suatu ide, objek, gagasan, dan praktik yang telah dilandasi dan diterima sebagai sebuah hal baru, baik oleh seseorang maupun kelompok sebagai bahan untuk diaplikasikan atau diadopsi. Inovasi terjadi karena adanya suatu kondisi dimana untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang memang membutuhkan cara baru agar lebih

efektif dan efisien dalam menanganinya. Dalam hal ini Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dalam menangani kasus stunting dengan membuat suatu inovasi dari program turunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Peraturan Bupati Nomer 84 Tahun 2019 mengenai perencanaan aksi daerah percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Pemalang dan merujuk pada program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu 5 Ng (JateNG GayeNG NginceNG woNG meteNG), maka Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang membuat suatu Program Inovasi Gerakan Masyarakat.

Gerakan masyarakat adalah upaya kolektif dari individu-individu dalam suatu komunitas atau masyarakat yang bertujuan untuk mencapai perubahan atau tujuan tertentu. Gerakan masyarakat bisa diorganisir secara formal maupun informal, melalui organisasi, lembaga, atau kelompok-kelompok yang berbagi kepentingan atau tujuan Bersama. Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang membuat suatu Program Inovasi Gerakan Masyarakat Mawar Nyiteng, yaitu merupakan sebuah gerakan kawal minum tablet tambah darah ibu hamil oleh keluarga yang merupakan salah satu program pemerintah kabupaten pemalang yang bertujuan untuk menyelamatkan ibu melahirkan dan bayinya agar tidak menjadi balita *stunting*. Program inovasi gerakan masyarakat mawar nyiteng ini tentunya membutuhkan partisipasi masyarakat dalam membantu memperlancar program inovasi ini.

Adanya istilah partisipasi sebenarnya diambil dari bahasa asing yaitu *participation*, yang dapat diartikan mengikut sertakan pihak lain. Sedangkan menurut Nur Laily, (2015) mendefinisikan partisipasi sebagai *feed-forward information and feedback*

*information*. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat sebagai sebuah proses komunikasi melalui dua arah yang diartikan partisipasi masyarakat adalah sebuah komunikasi antara pihak pemerintah sebagai sebuah pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai sebuah pihak yang merasakan secara langsung dampak dari adanya sebuah kebijakan tersebut.

Selaras dengan itu, Hakim, (2017) menyebutkan mengenai beberapa faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, seperti:

a. Jenis Kelamin

Adanya partisipasi yang diberikan oleh laki-laki dan wanita dalam suatu pembangunan akan berbeda. Hal ini dapat diketahui oleh adanya suatu sistem pelapisan sosial yang akan terbentuk dalam masyarakat yang masih membedakan kedudukan dan derajat, hal ini tentu yang akan menimbulkan suatu perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita.

b. Usia

Munculnya perbedaan usia tentu akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Di dalam sebuah masyarakat akan muncul perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas yang menimbulkan adanya golongan tua dan golongan muda dalam perbedaan seperti menyalurkan pendapat dan mengambil suatu keputusan.

c. Tingkat Pendidikan

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adanya tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar belakang pendidikan seseorang akan membuat bertambahnya ilmu pengetahuan yang luas mengenai pembangunan dan

bentuk serta tata cara partisipasi yang akan diberikan. Adanya faktor pendidikan ini dianggap penting dikarenakan pendidikan yang diperoleh akan membuat seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar dan cepat tanggap terhadap adanya inovasi.

d. Tingkat Penghasilan

Perbedaan penduduk yang lebih kaya kebanyakan akan mengeluarkan lebih banyak dan jarang melakukan kerja fisik secara sendiri. Sedangkan penduduk yang mempunyai penghasilan pas-pasan akan lebih cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga.

e. Mata Pencaharian

Hal ini masih berkaitan dengan adanya tingkat penghasilan seseorang. Dapat dikatakan mata pencaharian yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan sebuah pekerjaan mempunyai pengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, contohnya dalam menghadiri sebuah pertemuan, kerjabakti dll.

Menurut Slamet dalam Nurbaiti & Bambang, (2017) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat melalui sebuah proses pembangunan akan tercipta sebagai suatu peristiwa nyata jika terdapat faktor-faktor yang akan mendukungnya, yaitu a) adanya sebuah kesempatan, yaitu adanya sebuah situasi atau kondisi lingkungan yang disadari oleh sebuah individu yang berpeluang untuk berpartisipasi; b) adanya sebuah kemauan, yaitu terjadinya suatu dorongan yang menumbuhkan minat dan sikap mereka untuk termotivasi dalam berpartisipasi, contohnya seperti manfaat yang dapat dirasakan atas adanya partisipasi tersebut; dan c) adanya sebuah kemampuan, yaitu adanya suatu

kesadaran atau keyakinan dalam diri suatu individu untuk berpartisipasi dalam hal berpikir, tenaga, waktu, atau sarana dan material lainnya. Kemauan dan kemampuan ini dapat diartikan sebagai sebuah potensi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Sedangkan kesempatan lebih dipengaruhi oleh adanya situasi atau lingkungan di luar dari perilaku.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai beberapa bentuk partisipasi masyarakat, maka teori yang cocok untuk digunakan dalam penelitian ini adalah teori Slamet dalam Nurbaiti & Bambang, (2017). Hal tersebut dikarenakan konteks gerakan masyarakat sesuai dengan teori slamet yang menganalisis faktor pendukung partisipasi masyarakat dilihat melalui adanya kesempatan, kemauan, dan kemampuan. Adapun gerakan masyarakat sendiri merupakan sebuah gerakan masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam menyelesaikan suatu urusan baik mengikuti arahan pemerintah maupun dapat bergerak sendiri dalam mencapai sebuah tujuan, dalam hal ini tujuannya mengenai penenganan *stunting* di Kabupaten Pematang.

## 1.7. Definisi Konseptual dan Operasional

### 1.7.1. Definisi Konseptual

#### 1.7.1.1. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

#### 1.7.1.2. *Stunting*

*Stunting* merupakan sebuah masalah gizi yang secara kronis dapat disebabkan oleh pemenuhan asupan makanan yang buruk dan terlambatnya perkembangan dapat dimulai pada saat bayi masih dalam kandungan serta akan terlihat saat anak sudah berusia dua tahun.

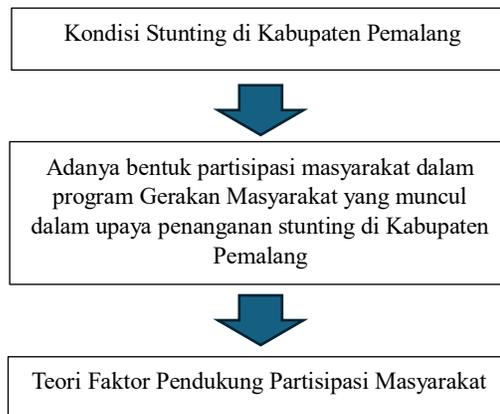
#### 1.7.1.3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat merupakan sebuah keterlibatan dari masyarakat yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program sosial yang dicanangkan oleh pemerintah, serta membantu masyarakat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini bentuk dari partisipasi masyarakat tersebut adalah sebuah gerakan masyarakat dalam membantu mencegah dan menanggulangi *stunting* di Kabupaten Pematang Jaya.

#### 1.7.2. Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Partisipasi Masyarakat	Adanya Kesempatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peluang Partisipasi</li></ul>
		Adanya Kemauan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dorongan minat dan sikap</li></ul>
		Adanya Kemampuan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kesadaran</li></ul>

## 1.8.Kerangka Berfikir



## 1.9.Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan sebuah langkah yang dilakukan secara terencana dan sesuai dengan prosedur atau sistematis yang ada dalam mendapatkan data, sehingga data yang diperoleh di lapangan akan mencapai tujuan yang di cita-citakan seperti menjawab suatu persoalan, masalah yang diteliti di lapangan, dan menjelaskan suatu metode penelitian saat terjun ke lapangan. Metode penelitian juga biasanya bertujuan dalam memecahkan suatu permasalahan dan menguji data yang diperoleh di lapangan (Darmalaksana, 2020).

Mengacu pada buku panduan penulisan tugas akhir program studi ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan mengacu pada buku yang ditulis oleh Dr. Farida Nugrahani, (2014) mengenai metode penelitian kualitatif, maka metode penelitian ini dibagi menjadi 5, yaitu:

### 1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

Menurut Yuliani, (2018) metode penelitian kualitatif bermakna penelitian yang

menyelidiki, mendeskripsikan, dan meningkatkan kualitas maupun karakteristik terhadap dampak sosial yang tidak dapat dijelaskan atau digambarkan dengan metode kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan suatu keadaan sosial dan mendeskripsikan situasi sosial dengan membandingkan gejala yang ditemukan. Sehingga nantinya dalam penelitian kualitatif ini, peneliti akan mencoba menjelaskan dan menganalisis mengenai seberapa efektifnya suatu inovasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menangani masalah *stunting*.

#### 1.9.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Pemalang yang saat ini merupakan kabupaten termiskin di Jawa Tengah yang menduduki urutan ke 5 dari 14 kabupaten termiskin. Penelitian ini berfokus pada inovasi apa yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang.

#### 1.9.3. Jenis Data

Jenis data merupakan hasil dari sumber data yang berasal dari data penelitian. Penelitian ini menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya yang membuat penelitian ini bersumber dari responden, yaitu Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang yang dalam hal ini ada Bu Indah Wijayanti, S.Gz , Bu Susi Kusumawati, S.KM , dan Bu Hariyahtun, S.KM yang merespon atau menjawab pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua yaitu:

##### a. Data Primer

Menurut Pratiwi, (2017) data primer adalah data yang berasal dari sumber asli dan data ini ditemukan melalui interaksi dengan narasumber yang dalam istilah

teknis dapat disebut dengan responden yang merupakan individu yang menjadi subjek penelitian atau yang memberikan informasi. Data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari sumber utama. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mendapatkan informasi dan data-data mengenai keefektivan inovasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menangani kasus *stunting*.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Menurut Marisya & Sukma, (2020) data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari pengamatan secara langsung, tetapi melalui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan semua informasi mengenai keefektivan inovasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menangani kasus *stunting*.

#### 1.9.4. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Teknik Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik dalam mengumpulkan data melalui peninggalan arsip-arsip termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Sugiyono [2018:476] dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan dalam

memperoleh data maupun informasi dalam bentuk buku arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sastrawacana, 2023). Informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Dalam teknik dokumentasi ini, peneliti akan mengumpulkan data yang berhubungan dengan *stunting*, serta dinas kesehatan dan gerakan masyarakat sebagai aktor pemeran utama dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Pematang Jaya. Langkah yang dilakukan dalam kegiatan penelitian tersebut ialah dengan melakukan pengurusan perizinan akses data yang akan dilakukan oleh peneliti dilokasi penelitian dinas kesehatan Kabupaten Pematang Jaya. Pengurusan permintaan akses data tersebut dilakukan untuk dapat mampu masuk ke dalam web situs e-PPGBM untuk meninjau data terkait yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian, salah satunya untuk meninjau beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *stunting* di wilayah kawasan daerah Kabupaten Pematang Jaya pada periode tahun 2023.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data ketika dua orang atau lebih bertemu secara tatap muka untuk memperoleh informasi dengan menanyakan seseorang yang merupakan informan dalam suatu survei. Menurut Kvale & Brinkmann, (2022) wawancara merupakan sebuah cara yang dilakukan dalam sebuah komunikasi antara peneliti dengan responden yang melibatkan serangkaian pertanyaan yang diarahkan untuk memperoleh sebuah informasi mengenai

pengalaman dan pandangan responden mengenai suatu topik atau masalah dalam penelitian (Prafitasari, 2023). Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau melalui tanya jawab langsung. Pada teknik wawancara ini, peneliti akan mewawancarai staf dinas kesehatan Kabupaten Pemalang yang secara khusus bertugas dalam hal *stunting*, serta masyarakat yang tergabung dalam suatu program Mawar Nyiteng dalam upayanya untuk mencegah *stunting* di Kabupaten Pemalang.

No.	NARASUMBER	DATA YANG DICARI
1.	<b>Indah Wijayanti, S.Gz</b> (Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data angka <i>stunting</i> terbaru dan beberapa tahun terakhir.</li> <li>• Faktor <i>stunting</i> di Kabupaten Pemalang</li> <li>• Jumlah data balita dan baduta <i>stunting</i> di Kabupaten Pemalang</li> </ul>
2.	<b>Susi Kusumawati, S.KM</b> (Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi kebijakan yang menjadi dasar penanganan <i>stunting</i></li> <li>• Siapa saja tim percepatan pencegahan dan penanggulangan <i>stunting</i> di Kabupaten Pemalang</li> </ul>

3.	<p><b>Adhiningsih Retno Andayani, S.S.T.Keb.</b> (Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang)</p> <p><b>Risfi Aulia Azzahra</b> (sebagai kader atau sukarelawan dari Masyarakat dalam program Mawar Nyiteng di posyandu Kecamatan Petarukan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa program inovasi gerakan masyarakat dalam penanganan <i>stunting</i> di Kabupaten Pemalang</li> <li>• Mengenai Mawar Nyiteng (apa itu program inovasi mawar nyiteng, siapa aktor yang terlibat, bagaimana pelaksanaan programnya, apa <i>small wish</i> (dampak kegiatan tersebut terhadap <i>stunting</i> hingga saat ini), apa kendala selama program itu berjalan</li> </ul>
----	--	---

### 1.9.5. Teknik Analisis Data

Menurut Rijali, (2019) mengemukakan bahwa analisis data merupakan suatu upaya untuk menemukan dan mengatur catatan pengamatan secara sistematis, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman para peneliti tentang kasus -kasus yang dipelajari dan menyajikannya sebagai temuan untuk orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini mempunyai empat tahapan, yaitu reduksi data, analisis data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## 1. Reduksi Data

Reduksi data dengan analisis data yang dilakukan dengan proses pemilihan data dan informasi yang akan didapatkan selama penelitian dilapangan. Penelitian ini fokus pada konsep dan pola data yang dirancang dalam bentuk analisa akhir. Hasil wawancara dilapangan yang kemudian di reduksi dengan langkah penelitian dalam menyederhanakan data, yaitu semua hasil pengamatan yang diperoleh berdasarkan pada hasil olah data dari situs aplikasi e-PPGBM. Penelitian mencatat atau merekam kemudian peneliti melaporkan secara jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Langkah yang dilakukan peneliti dari hasil wawancara dalam mereduksi data. Mengelompokan informasi-informasi, serta tanggapan dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang terkait perizinan akses masuk pada situs aplikasi e-PPGBM.

## 2. Analisis Data

Setelah terklarifikasi dengan jelas, analisis data bisa dilakukan untuk menemukan pola. Analisis data nantinya akan dimulai dengan melakukan wawancara terlebih dahulu dengan dinas kesehatan dan masyarakat yang telah berupaya dalam melakukan inovasi dalam hal penurunan *stunting* di Kabupaten Pematang untuk mengetahui dan memahami situasi serta kondisi obyek penelitian. Kemudian setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat instrumen hasil wawancara. Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut ke dalam instrumen penelitian kemudian peneliti membaca secara cermat untuk kemudian data akan disajikan.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menampilkan hasil akhir penelitian dengan kalimat yang disusun secara logis dan mudah. Sehingga penyajian data yang jelas bisa membantu peneliti untuk menyelesaikan hasil akhir. Penyajian data menggunakan teks secara naratif dan dapat juga berupa bahasa nonverbal seperti diagram lingkaran yang menunjukkan hasil olah data dari aplikasi e-PPGBM. Penyajian data merupakan suatu proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori dan pengelompokan yang diperlukan.

### 4. Kesimpulan

Data yang telah disajikan menggunakan jenis teknik analisis data. Hal ini merupakan suatu usaha yang dilakukan guna mencari sebuah kesimpulan yang disusun berdasarkan dari proses yang dilakukan selama kegiatan penelitian berlangsung. Pada hasil data dan informasi ditemukan suatu keseluruhan data informasi yang didapat agar bisa diuji kebenarannya dan kecocokan sesuai dengan tujuan dari kegiatan.